PROPOSAL PENELITIAN MANDIRI

SISTEM KENEGARAAN PANCASILA SEBAGAI INTEGRITAS NKRI

PENELITI

AUGUST HADIWIJONO, S.H., M.Hum.
NIDN. 0704085702

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
2017

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENELITIAN MANDIRI

1. Judul Penelitian	**: Sistem Kenegaraan Pancasila Sebagai Integritas NKRI**
a. Bidang Ilmu	: Ilmu Hukum
b. Kategori Penelitian	: Mandiri
2. Peneliti	
Data Pribadi	
a. Nama Lengkap	: August Hadiwijono, S.H., M.Hum.
b. Jenis Kelamin	: Laki-laki
c. NIDN / NIP	: 0704085702 / 195708041986031001
d. Jabatan Struktural	: -
e. Strata / Jabatan Fungsional	: S2 / Lektor
f. Fakultas/Jurusan	: Hukum/ Ilmu Hukum
g. Pusat Penelitian	: Universitas Merdeka Malang
h. Alamat	: Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang
i. Telepon/Faks	: 0341-568395 / 0341- 581056
j. Alamat Rumah	: Jl. Poncowati No.15 Malang
k. Telepon	: (0341) 367863
3. Jangka Waktu Penelitian	: 6 bulan
4. Pembiayaan	: Sendiri / Rp. 5.000.000,00

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Setiyono, S.H., M.H.

Malang, Agustus 2017
Peneliti,

August Hadiwijono, S.H., M.Hum.

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
Universitas Merdeka Malang,

Prof . Ir. H. Agus Suprapto, M.Sc., Ph.D.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Kegunaan Penelitian 5

BAB II KAJIAN PUSTAKA 6

A. Filsafat Pancasila 6

1. Pengertian Filsafat Pancasila 6

2. Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara 7

3. Kesatuan dan Susunan Pancasila 10

4. Pancasila sebagai Ideologi Negara 11

B. Identitas Nasional 14

1. Hakekat dan Dimensi Identitas Nasional 14

2. Karakteristik Identitas Nasional 16

3. Arti Pentingnya Pancasila Dalam Meneguhkan Identitas Nasional 20

C. Nasionalisme 23

1. Nasionalisme Indonesia 25

2. Paham Nasionalisme Indonesia 28

3. Lahirnya Nasionalisme Indonesia 30

4. Multikulturalisme 33

5. Kaitannya dengan Nasionalisme 35

BAB III METODE PENELITIAN 37

A. Jenis Penelitian 37

B. Jenis Bahan Hukum 37

C. Teknik Analisis Bahan Hukum 38

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 memancarkan keunggulan sistem kenegaraan Indonesia Raya (baik sebagai negara berkedaulatan rakyat, maupun sebagai negara hukum); sehingga sempurna keunggulannya dari nilai natural (SDA dan SDM), dan kultural (sistem budaya, filsafat dan peradaban) sebagai bangsa yang mewarisi peradaban yang bermartabat. Visi-misi dan tantangan bangsa dan NKRI terutama mampu menegakkan integritas Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 potensial didukung dengan berbagai keunggulan; terutama integritas sebagai negara demokrasi dan negara hukum, sekaligus kesejahteraan dan keadilan sosial yang lebih bermartabat. Nilai-nilai fundamental dimaksud terutama: Pilar-Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD 45; NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) secara niscaya menjadi visi-misi pembudayaan yang mendesak.[1]

Kedudukan SDM dalam ajaran HAM berdasarkan filsafat negaranya, dibentuklah sistem kenegaraan (berkedaulatan rakyat / demokrasi; dan atau negara hukum). Sistem kenegaraan ini ditegakkan dan dikembangkan secara niscaya (a priori, imperatif) berdasarkan asas fundamental sistem filsafat dan atau ideoogi nasional yang memberikan identitas dan integritas bagaimana

[1]Mohammad Noor Syam. *Membudayakan Pilar-Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.* Makalah Sarasehan Nasional. Malang. 2010. Hlm 1.

hukum, sosial-politik dan ketatanegaraan ditegakkan; dalam wawasan nasional dan internasional (universal).

Budaya dan peradaban umat manusia berawal dan berpuncak dengan nilai-nilai filsafat yang dikembangkan dan ditegakkan sebagai sistem ideologi. Maknanya nilai filsafat sebagai jangkauan tertinggi pemikiran untuk menemukan hakekat kebenaran (kebenaran hakiki; karenanya dijadikan filsafat hidup, pandangan hidup, (*Weltanschauung*); sekaligus memancarkan jiwa bangsa, jatidiri bangsa (*Volksgeist*) dan martabat nasional.

SDM yang mewarisi jiwa bangsa dan jatidiri nasional, demi cita-cita dan martabat nasional akan membentuk kesatuan nasional (integritas nasional, martabat nasional). Semangat demikian dikenal sebagai jiwa nasionalisme (wawasan kebangsaan, wawasan nasional). Integritas sistem filsafat Pancasila (=sistem ideologi nasional, ideologi negara) yang memancarkan integritas martabatnya sebagai sistem filsafat dan ideologi *theisme-religious*. Bangsa Indonesia melalui PPKI dengan hikmat kebijaksanaan, kepemimpinan dan kenegarawanan dengan mufakat menetapkan dan mengesahkan Sistem Kenegaraan Pancasila dengan visi-misi sebagai diamanatkan dalam UUD Proklamasi 45.

Wawasan kebangsaan yang dijiwai sistem filsafat dan ideologi nasional (in casu : Filsafat Pancasila) insyaAllah akan lebih tegar menghadapi berbagai tantangan zaman, karena integritas Sistem Filsafat Pancasila sebagai asas-kerokhanian bangsa dan negara --- sekaligus sebagai pandangan hidup (*Weltanschauung*), jiwa bangsa, jatidiri bangsa (*Volksgeist*) dan integritas

martabat nasional; terpancar dalam karakter kepribadian SDM yang berjiwa Pancasila (*theisme-religious*). Jiwa dan semangat demikian, menjadi sumber motivasi dan energi nasional untuk senantiasa menegakkan integritas sistem kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 dengan visi-misi pembudayaan Filsafat Pancasila dan ideologi nasional Indonesia Raya.

Perjuangan bangsa Indonesia yang bersifat lokal, kedaerahan belum mampu mewujudkan terbentuknya negara merdeka. Namun demikian perjuangan tersebut telah melahirkan kekuatan mental spiritual, yakni lahirnya sikap dan perilaku heroik, patriotik yang pada gilirannya malahirkan kekuatan dan semangat luar biasa, ialah kesadaran perlunya persatuan dan kesatuan. Karena hanya dengan persatuan dan kesatuan, cita-cita Indonesia merdeka akan terwujud. Dengan kata lain semangat persatuan dan kesatuan merupakan syarat utama terbentuknya negara Indonesia merdeka.

Berpijak atas fakta sejarah tersebut, semangat persatuan dan kesatuan inilah yang saat sekarang perlu dibina dan ditegakkan serta harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, dalam mana semangat perjuangan dalam bentuk kesatuan dan persatuan itu merupakan nilai nasionalisme yang mestinya tertanam dalam setiap jiwa kepribadian warga negara Indonesia. Seiring dengan gelombang globalisasi membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat, yakni semangat perjuangan bangsa tersebut telah mengalami penurunan yang cukup serius yang bisa membahayakan persatuan kesatuan dan keutuhan bangsa maupun negara.

Dalam menghadapi globalisasi dan sekaligus mengisi kemerdekaan, memerlukan perjuangan setiap warga negara sesuai bidang profesi (pekerjaan) dan dilandasi oleh : nilai-nilai Pancasila; memiliki wawasan dan kesadaran bernegara; sikap perilaku cinta tanah air; mengutamakan persatuan dan kesatuan; ikut serta dalam upaya hankam negara, semuanya itu dilakukan demi eksistensi dan tetap tegaknya bangsa dan negara Indonesia. Dalam rangka mewujudkan perjuangan itu, strategi pemerintah menempatkan jalur pendidikan sebagai wahana (sarana) pengembangan melalui pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia. Dengan kesatuan jalur pendidikan tersebut diharapkan mempu mengembangkan kepribadian bangsa Indonesia dan mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah penelitian dengan judul "Sistem Kenegaraan Pancasila Sebagai Integritas NKRI."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah sistem kenegaraan pancasila sebagai integritas NKRI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut menganalisis sistem kenegaraan pancasila sebagai integritas NKRI.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Filsafat Pancasila

1. Pengertian

Istilah filsafat berasal dari kata Yunani "*philosophia*" dari kata *philia* = cinta, *philein* = mencintai dan *Sophia* = kebijaksanaan. Dalam kata Inggris *philosophy*, kata Arab *falsafah. Philosophia* diartikan cinta kebijaksanaan (mencintai kebijaksanaan).[2] Kebijaksanaan yang dimaksud ialah melakukan perbuatan atas dorongan kehendak yang baik berdasarkan putusan akal yang benar sesuai dengan rasa kemanusiaan. Dari kata tersebut, filsafat adalah menkecintain perbuatan yang baik beerdasarkan putusan akal yang sesuai dengan rasa kemanusiaan. Istilah Pancasila dari kata sanskerta "pancasyila", panca = lima, syila = dasar, prinsip, asas. Pancasila = lima asas, lima dasar, lima prinsip. Filsafat Pancasila secara etimilogik = cinta kebijaksanaan yang berlandaskan lima prinsip, atau cinta kebijaksanaan dengan berpedoman pada lima asas.

Secara terminologi (apa yang terkandung dalam istilahnya), filsafat adalah pemikiran secara kritis dan sistematis untuk mencari kebenaran atau hakikat sesuatu. Mencari hakikat sesuatu adalah tinjauan secara ontologis dan mencari kebenaran sesuatu adalah tinjauan secara epistemologis. Sesuatu dalam hal ini adalah Pancasila atau lima asas, lima

[2]Rasjidi, Lili. *Pengantar Filsafat Hukum; Apakah Hukum itu?*. Bandung: Remadja Karya, 2008.

prinsip, lima dasar. Dengan demikian filsafat Pancasila adalah pemikiran secara kritis dan sistematis untuk mencari hakikat atau kebenaran lima asas dalam kehidupan manusia. Pemikiran yang kritis biasanya berangkat dari suatu pertanyaan yang menanyakan hakikat atau kebenaran, seperti : apa Pancasila itu sehingga dinyatakan sebagai jiwa bangsa; apa benar Pancasila nenjadi jiwa kepribasdian bangsa Indonesia. Sudah tentu pertanyaan tersebut membutuhkan pembuktian, oleh karena itu jawaban akan berhubungan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan dan tidak boleh ada kontradiksi, sehingga merupakan suatu uraian yang sistmastis.

Istilah Pancasila dapat bermacam-macam makna, namun dapat dibedakan dalam dua kelompok berdasar penghayatan material dan penghayatan formal. Atas dasar penghayatan material Pancasila sebagai filsafat hidup diartikan "suatu pandangan hidup bangsa yang berketuhanan berperikemanusiaan berpersatuan berkerakyatan dan berkeadilan". Berdasar penghayatan formal Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah "suatu ideologi negara yang berketuhanan berperikemanusiaan berpersatuan berkerakyatan dan berkeadilan".

Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Dalam prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi, merambah hingga produk filsafat (falsafah). Pancasila sebagai produk filsafat berarti digunakan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis. Ini berarti Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan

peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Hal yang mendasari pernyataan ini adalah karena pada hakikatnya Pancasila memiliki sistem nilai *(value system)* yang didapat dari penggalian dan pengejawantahan nilai-nilai luhur mendasar dari kebudayaan bangsa Indonesia sepanjang sejarah, berakar dari unsur-unsur kebudayaan luar yang sesuai sehingga secara keseluruhannya terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia.[3]

2. Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara

Pancasila sebagai dasar filsafat negara materinya sudah ada sejak bangsa Indonesia ada, hanya rumusannya baru kemudian sekitar menjelang dibentuknya negara Indonesia merdeka tahun 1945. Dengan demikian Pancasila itu lahir sejak adanya bangsa Indonesia, sedangkan 1 Juni 1945 lebih merupakan pemberian nama pada lima asas kehidupan bangsa Indonesia dan bukan pada materi Pancasila.

Rumusan lima asas yang diberi nama Pancasila itu baru direnungkan pertengahan tahun 1945 dibandingkan dengan materi Pancasila yang telah lebih dulu ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yakni berketuhanan dalam bentuk kehidupan beragama; berkemanusiaan dalam bentuk

[3]Notonagoro. *Beberapa hal mengenai falsafah Pancasila.* Jakarta : Rajawali. 2002.

mencintai sesama manusia dengan segala hak asasinya; berpersatuan dan kesatuan dalam bentuk rasa nasionalisme atau jiwa kebangsaan; berkerakyatan atau dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dalam bentuk cinta sesama warga negara, cinta warga keluarga atau berkekeluargaan; berkeadilan dalam bentuk memberikan dan melakukan sesuatu yang telah menjadi haknya.[4]

Materi Pancasila yang sudah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia itu adalah merupakan obyek materi dan rumusannya dalam bentuk lima asas itu merupakan obyek formal. Oleh karena itu Pancasila adalah hasil perenungan yang mendalam oleh tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia, maka tidak salah bila Pancasila disebut sebagai dasar filsafat Pancasila. Perumusan lima asas (Pancasila) kemudian diperkaya dengan ide-ide besar dunia yang lebih dulu berkembang seperti liberalisme, sosialisme. tetapi perumusannya diperuntukkan bagi negara Indonesia yang mendasarekan kebersamaan dan kekeluargaan sebagai ciri bangsa Indonesia.

Tokoh-tokoh kenegaraan merumuskan Pancasila bukan mengada-ada, tetapi direnungkan dari kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, yang kemudian dikehendaki dalam kehidupan bernegara sebagai dasar negara Indonesia merdeka dan selanjutnya digunakan sebagai ideologi negara. Oleh karena Pancasila direnungkan darti kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, berarti Pancasila merupakan jiwa bangsa yang menjadi kepribadian bangsa. Dari jiwa bangsa itulah kemudian terwujud sebagai

[4]Kartohadiprodjo, Soediman. *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, cetakan ke-4, Bandung, Penerbit Alumni. 1983.

pandangan hidup dan sekaligus sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat dan berbangsa.

Atas dasar kenyataan tersebut maka Pancasila selain berfungsi sebagai dasar filsafat negara, dilihat dari aspek material Pancasila juga berfungsi sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia, yakni melandasi semua pola kehidupan berbangsa , bermasyarakat dan bernegara. Hal ini terbukti dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, yakni : (1) sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dekrip Presiden 5 Juli 1959; (2) dalam Pembukaan UUD 1945; (3) dalam Mukadimah Konstitusi RIS 1949; (4) dalam Mukadimah UUDS 1950; dalam TAP MPR No.II tahun 1978 tentang P-4 (Ekaprasetia Pancakarsa).

3. Kesatuan dan Susunan Pancasila

Pancasila sebagai dasar filsafat negara bukan lima dasar negara, tetapi satu dasar negara yang terdiri atas lima dasar sebagai satu kesatuan, sehingga susunannya tidak tunggal tetapi majemuk tunggal. Kelima asas itu bersama-sama merupakan bagian dari suatu keseluruhan, dan merupakan bagian dalam hubungan keutuhan yang bertingkat, makin tinggi tingkatnnya makin sempit (dikenal dengan susunan hiererkis pyramidal). tiap bagian berkait-kaitan berhubungan erat satu dengan yang lain tidak terpisahkan.

Kesatuan dalam Pancasila itu merupakan hal yang mutlak sebagai dasar negara, maka unsur-unsurnya juga mutlak harus ada. Jika tidak ada

salah satu unsur maka tidak ada sifat persatuan, maka tidak ada Pancasila. Kesatuan Pancasila seperti itu unsur-unsurnya (sila-sila) mderupakan bagian yang tidak saling bertentangan, secara bersama-sama menyusun satu kesatuan, sehingga tiap sila (unsur) merupakan bagian yang mutlak. Jika salah satu sila dilepas dari kesatuannya tidak berhubungan dengan lainnya, maka sila itu kehilangan kedudukan dan fungsinya, karena tidak berarti jika tidak dalam satu kesatuan. Jadi jika dihilanhgkan satu sila, hilanglah fungsi Pancasila itu. Kesatuan Pancasila seperti itu disebut dengan kesatuan yang bersifat organik.

Mengenai susunan sila-silanya berbentuk hiererkis piramidal dengan basisnya Ketuhanan Yang Maha Esa dan puncaknya Keadilan sosial. Tuhan adalah pencipta segala makluk, yang maha kuasa, maha esa, asal segala sesuatu dan sekaligus sebagai dasar semua hal yang ada dan yang mungkin ada. Dalam susunan hiererkis piramidal itu bahwa sila yang pertama dan seterusnya tiap-tiap sila bagi sila berikutnya adalah menjaadi dasar dsan tiap-tiap sil;a berikuitnya itu merupakan penjuelmaan atau pengkhususan dari sila yang mendahuluinya. Dengan demikian sila peertama merupakan dasar umum dasar yang terbesar lingkungannya, dan sila kelima adalah paling khusus dan lingkungannya paling terbatas.

4. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Setiap ideologi selalu dikaitkan dengan pandangan hidup bangsa sebagai pendukungnya yang didasarkan pada keyakinan filsafati tertentu, yakni pandangan tentang hak dan kewajiban pribadi terhadap masyarakat

dan negara yang berorientasi pada terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan (adil makmur). Istilah ideologi banyak memiliki arti (pembatasan), namun secara umum ideologi adalah "kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individual maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan".

Dalam batasan itu, ideologi merupakan suatu gagasan manusia dan juga dihubungkan dengan negara. Hal ini mencerminkan bahwa ideologi selalu dhubungkan dengan negara. Dalam konteks nasional, ideologi)sebagaimana dirumuskan oleh Lemhannas) adalah "perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai di dalam melangsungkan dan mengembanghkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara".

Ideologi selalu bnerkaitan dengan pandangan hidup suatu bangsa sebagai dasar filsafatnya, yakni merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Sebagaimana disebutkan Koento Wibisono bahwa ideologi selalu bertolak dari suatu keyakinan filsafati tertentu, yaitu pandangannya tentang apa, siapa, dan bagaimana manusia itu sebagai pendukung ideologi, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan pribadi dalam konteks hak dan kewajiban terhadap masyarakat dan negara. Pengejawantahan dari pandangan hidup tersebut tercermin dalam kehidupan praksis (dalam bidang epoleksosbud dan hankam).[5]

---

[5]Wibisono, Koento. *Filsafat Ilmu sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Klaten: Intan Pariwara. 1997.

Setiap ideologi selalu tersimpul adanya tiga (3) unsur pokok, yaitu keyakinan, mitos dan loyalitas.

a. Unsur keyakinan. setiap ideologi selalu memuat konsep-konsep dasar yang menggambarkan seperangkat keyakinan yang dimunculkan dalam tingkah laku pendukungnya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

   Pancasila merupakan seperangkat nilai luhur yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Demikian juga komunis meyakini bahwa kesetaraan sosial, kerja sama sosial dan solidaritas sosial akan mendatangkan kebahagiaan bersama. Lioberal meyakini kebebasan mengejar hidup di teengah-tengah kekayaan materi yang dicapai dengan bebas akan tercapainya kesejahteraan.

b. Unsur mitos. Setiap ideologi selalu memitoskan suatu ajaran dari seseorang atau beberapa orang sebagai kesatuan, yang secara fundamental mengajarkan suatu cara bagaimana sesuatu hal yang ideal itu pasti akan dapat dicapai.

   Pancasila yang diagungkan itu adalah ajaran (hasil rumusan) tokoh-tokoh kenegaraan yang kemudian disahkan oleh PPKI dan bukan pemikiran orang perorang. Komunis diagungkan dari ajaran Karl Marx kemudian disistematiskan oleh Frederick Engels. Liberal dari pemikiran beberapa orang seperti Hobbes, JJ Rousseau.

c. Unsur loyalitas. Bahwa setiap ideologi menuntut adanya kesetiaan dan keterlibatan secara optimal para pendukungnya.

Pendukung Pancasila setia kartena dapat menyatukan bangsa yangmajemuk, dapat dipikrkan dan dapat diwujudkan dalam kehidupan. Pendukung komunis setia, karena dapat memberikan suasana hidup aman tanpa pertentangan, dapat dipirkan, dapat dilaksanakan dalam kehidupan, membela kaum yang lemah. Pendukung liberal setia, karena membela hak asasi manusia, dapat dipikirkan, dapat dilaksanakan dalam kehidupan.

Pancasila sebagai ideologi negara adalah ideologi terbuka, karena merupakan sekumpulan nilai-nilai luhur yang diyakini kebearannya, hal ini berarti Pancasila telah memenuhi unsur keyakinan. Pancasila sebagai hasil kesepakatan nasional yang diagungkan sebagai dasar negara, telah memenuhi unsur mitos (pengagungan). Pancasila dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dinalar sesuai akal pikiran serta bersifat susila karena terkandung moral keagamaan dan moral kemanusiaan.

B. Identitas Nasional

1. Hakekat dan Dimensi Identitas Nasional

Identitas adalah ungkapan nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakannya dengan bangsa lain. Kekhasan yang melekat itu, bukan sesuatu yang sudah selesai, tetapi sesuatu yang terus berkembang dan konstektual mengikuti perkembangan zaman. Dalam kehidupan bersama, setiap manusia mempunyai ciri-ciri khusus yang disebut dengan istilah identitas atau jati diri yang melekat pada seseorang.

Identitas berarti juga sekumpulan ciri khusus yang membedakan dengan yang lain. Hal ini berlaku juga bagi bangsa sebagai suatu kesatuan hidup dalam wadah negara. Dengan demikian identitas tidak hanya mengacu pada seseorang atau individu melainkan mengacu pada suatu kelompok tertentu dan dapat memisahkan dengan kelompok yang lain.[6]

Istilah nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang terikat oleh kesamaan-kesamaan, bisa fisik (budaya, agama dan bahasa) maupun non fisik (keinginan, cita-cita dan tujuan). Himpunan kelomp-kelompok itulah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional. Identitas bangsa ini yang kemudian melahirkan tindakan kelompok *(collective action)* yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau gerakan-gerakan yang diberi atribut nasional.

Istilah nasional dalam arti lain berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, sehingga identitas nasional adalah jati diri yang berasal dari bangsa sendiri, yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berekeadilan, yaitu Pancasila. Dengan demikian dalam konteks bangsa Indonesia, jati diri bangsa Indonesia adalah ber-Pancasila, karena adanya lima asas itu ada dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia secara alami, yaitu dalam adat istiadat, dalam kehidupan beragama dan dalam kehidupan budaya (dikenal dengan triprakara).

---

[6]Kartohadiprodjo, Soediman. *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, cetakan ke-4, Bandung, Penerbit Alumni. 1983.

Istilah nasional juga berarti bangsa yang menegara, yaitu bangsa yang dibentuk (bangsa bentukan) dengan semangat sumpah pemuda dan bukan bangsa alami. Jadi bangsa Indonesia merupakan bangsa bentukan, yaitu dibentuk tahun 1928, maka dari itu membutuhkan semangat persatuan dan kesatuan sebagai pembinaannya, jika bubar negara Indonesia maka bubarlah bangsa Indonesia.

2. Karakteristik Identitas Nasional

Himpunan kelompok-kelompopk yang membesar sebagai suku bangsa kemudian bersatu antar suku menjadi bangsa. Bangsa inilah yang kemudian memiliki sifat-sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu sebagai integrasi bangsa (integrasi nasional). Watak inilah merupakan jiwa bangsa sebagai landasan untuk bertindak.

Identitas nasional Indonesia merujuk bangsa Indonesia satu bangsa yang majemuk, maka untuk mewujudkannya diperlukan kebijaksanaan pemerintah dengan tidak membedakan suku, agama, kebudayaan dan bahasa. Bangsa Indonesia yang berada di pelbagai pulau adalah bangsa yang bhineka, bangsa yang majemuk, terdiri atas pelbagai suku bangsa atau etnis, agama, beraneka kebudayaan dan bahasa daerah yang semuanya itu dimanunggalkan sebagai bangsa Indonesia. dengan demikian identitas nasional itu memiliki unsur-unsur pembentuk. Unsur-unsur itu adalah :

a. Suku bangsa

Suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lainnya berdasarkan kesadaran identitas seperti

perbedaan kebudayaan terutama bahasa. dengan demikian kebudayaan dan bahasa merupakanm unsur pembentuk identitas nasional.

Indonesia faktanya terdiri atas pelbagai suku (etnis) yang menempati pelbagai pulau (Nusantara) itu dimanunggalkan (disatukan) dengan sesanti bhineka tunggal ika, sehingga keragaman dan berbagai aspek kebudayaan lainnya itu tetap bersatu dalam wadah keindonesiaan. Oleh karena itu bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk yang disatukan, yaitu satu dalam bangsa, satu dalam kenusaan.

b. Agama

Berbagai agama yang hidup di Indonesia, Islam merupakan agama mayoritas. Namun demikian tidak menjadi kesepakatan (harus) Islam menjadi dasar mengatur negara dan hukum Islam tidak menjadi hukum negara, tetapi Islam tetap menghormati kelompok (agama) lain dengan sikap tenggang rasa *(solidariteit)*. Hal ini berlaku juga bagi semua agama di Indonesia, dan sudah menjadi kesadaran kita semua bahwa negara yang multiagama adalah rawan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, Indonesia (negara) menjunjung tinggi semua agama dan negara yang berketuhanan Yang Maha Esa.

c. Kebudayaan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa kebudayaan daerah merupakan kerangka dasar yang saling berintergrasi menuju ke kebudayan nasional (kebudayan bangsa). Maka dari itu perkembangan

kebudayaan bangsa tidak akan terlepas dari kebudayaan daerah. Sehingga dengan demikian kebudayaan nasional akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya kebudayaan daerah, majunya kebudayaan daerah berarti juga majunya kebudayan nasional. Perlu disadari bahwa berintegrasinya budaya daerah secara nasional itu akan mempekokoh (menjadi tangguh) integrasi nasional, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional.

d. Bahasa

Bahasa Indonesia adalah perkembangan dari bahasa Melayu yang sebelumnya menjadi bahasa perdagangan dan bahasa penghubung berbagai suku di kepulauan Nusantara dan kemudian berkembang menjadi nama bahasa Indonesia. Baru kemudian melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 para tokoh muda dari berbagai latar belakang suku dan budaya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan setelah kemerdekaan ditetapkan menjadi bahasa nasional.[7]

Selain unsur-unsur tersebut, identitas bangsa Indonesia ditunjukkan pula oleh aspek alamiah, ialah kemajemukan (bangsa yang majemuk). Kemajemukan itu dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama dan bahasa.

---

[7]Mohammad Noor Syam. *Penjabaran Fislafat Pancasila dalam Filsafat Hukum* (*sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional*), *disertasi* edisi III, Malang, Laboratorium Pancasila. 2007.

a. Sejarah

Sejarah mencatat bahwa sebelum terbentuknya NKRI, di Indonesia telah berkembang 2 kerajaan besar yang pengaruhnya sampai menembus batas territorial kerajaan itu, ialah Majapahit dan Sriwijaya. Kebesaran kerajaan itu, bagi bangsa Indonesia menjadi pendorong semangat perjuangan dikemudian akibat pencengkeraman penjajah, ialah mengusir penjajah. Sehingga dapat dikatakan menjadi semangat tumbuhnya nasionalisme untuk terus menyuarakan tuntutan merdeka, yang ditandai oleh banyaknya perjuangan tokoh-tokoh nasional terhadap imperialisme penjajah di berbagai daerah Nusantara.

b. Kebudayaan

Salah satu aspek kebudayaan pembentuk identitas nasional adalah nilai kebersamaan sebagai bangsa yang majemuk (plural). Nilai ini tercermin dalam Pancasila, dalam mana Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah hidup dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum terbentuknya bangsa Indonesia merdeka. Pancasila itulah mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, suku, agama, bahasa dan pulau. Inilah yang dikenal dengan kemajemukan yang bersifat alamiah.

c. Bahasa

Yang perlu dipahami bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa penghubung *(lingua franca)* dari berbagai kelompok etnis yang mendiami pulau Nusantara. Sekaligus merupakan bahasa persatuan

sebagaimana ditegaskan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memberi sumbangan besar bagi terbentuknya persatuan dan nasionalisme Indonesia.

d. Secara alamiah bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, budaya sesuai dengan kondisi geografisnya, Hal yang sangat penting dalam lingkungan yang majemuk itu, adalah pengembangan dan pembudayaan semangat untuk hidup dalam kebersamaan, sehingga terpeliharanya persatuan dan kesatuan dari kemajemukan tersebut.

e. Keragaman agama, keyakinan pada bangsa Indonesia, tidak saja dijamin oleh konstitusi. Tetapi perlu diwujudkan dalam sikap dan tindakan utk tidak memaksakan kehendak pada pihak lain baik mayoritas maupun minoritas.

3. Arti Pentingnya Pancasila Dalam Meneguhkan Identitas Nasional

Fakta bahwa tidak ada suatu bangsa yang hidup terpisah dari akar budayanya, dan tidak ada pula bangsa yang hidup tanpa pengaruh dari luar. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang hidup dengan kelenturan budayanya dan mampu mengadaptasi unsur-unsur luar yang dinilai baik, Unsur luar itu dapat memperkaya nilai lokal yang dimiliki. Namun bangsa yang tidak mampu beradaptasi dengan unsur luar, menjadikan bangsa itu kering, sebaliknya bangsa yang terlalu mendambakan unsur luar dan mengesampingkan budaya yang dimiliki (nilai lokal), maka bangsa tersebut kehilangan identitas, sehingga tidak mampu menjadi dirinya sendiri.

Budaya (unsur) luar dan nilai lokal, masing-masing hidup dengan kekhasannya sendiri, namun tidak menutup perlunya kerja sama dalam hal-hal universal untuk terwujudnya dunia yang aman dan manusiawi. Bangsa untuk bisa maju mengikuti perkembangan zaman, perlu belajar atas kemajuan bangsa lain, meskipun tidak berarti meniru apa yang dilakukan bangsa tersebut. Dengan kata lain perlu bersikap cerdas dan bijaksana dalam mengadopsi hal-hal yang lebih baik dari luar, tidak apriori terhadap apa saja yang berasal dari luar, tidak meniru secara babi buta apa saja dari luar. Bangsa Indonesia memiliki kekhasan geografis, budaya, pandangan hidup Pancasila. Semua itu menjadi modal dasar untuk dapat dikembangkan menjadi dirinya sendiri. Pancasila adalah capaian demokratis yang sangat penting dan tinggi nilainya yang dihasilkan para pendiri bangsa /negara *(founding father)*.

Pancasila sekaligus merupakan wujud konsensus nasional. Disebut sebagai capaian demokratis yang sangat tinggi dan wujud konsensus nasional, kita perlu merujuk sejarah. Ketika para pembentuk negara merumuskan dasar negara Indonesia merdeka, (Pancasila), terjadi perdebatan kritis dan serius antara golongan Islam dan golongan kebangsaaan (nasionalis). Perlu diketahui bahwa dalam perjuangan mencapai cita-cita, bangsa Indonesia secara garis besar terkelompok ke dalam dua golongan besar, yakni golongan Islam dan golongan kebangsaan. Kedua golongan tersebut sudah terbentuk sejak penjajahan Belanda, yakni sebagai konsekuensi dari sistem pendidikan yang berlaku

waktu itu, ialah sistem pendidikan barat yang lebih bersifat sekularistik, rasional dan sistem pondok pesantren yang bersifat religius cenderung anti penjajah (Belanda).

Pengaruh sistem pendidikan itu, termanifestasikan juga ke dalam budaya politik, termasuk dalam menanggapi masalah yang menyangkut kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Maka sewaktu merumuskan dasar kehidupan bernegara Indonesia merdeka, masing-masing golongan mempunyai persepsi yang berbeda.

Bagi kita bangsa Indonesia, Pancasila adalah capaian demokrasi yang dihasilkan para pendiri negara. Maka sebutan Pancasila sebagai bingkai kemajemukan, simbol persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai konsensus nasional, menjadi bukti bahwa dalam Pancasila itu merupakan titik pertemuan nilai-nilai dan pandangan ideologi, yang kemudian dijadikan landasan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila-sila Pancasila pada dasarnya mewakili beragam pandangan dan kelompok dominan di Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia terdapat beragam pemikiran dan pergerakan nasional dengan basis ideologi yang berbeda (nasionalisme, liberalisme, sosialisme, Islamisme). Di samping itu, Indonesia juga didiami penduduk dengan beragam tradisi.

Pancasila merupakan sebuah pandangan hidup yang terbuka dan dinamis, karena muatan Pancasila merupakan perpaduan antara nilai-nilai keindonesiaan yang majemuk dengan nilai-nilai yang bersifat universal.

Inilah keberhasilan para pendiri negara dalam menyerap pemikiran dan nilai-nilai yang hidup dalam budaya masyarakat Indonesia.

C. Nasionalisme

Terminologi Nasionalisme mempunyai sifat yang komplek, karena dapat sebagai fenomena sosial, politik, ideologik, psikologik maupun filsafat. Karena itu banyak pengertian tentang nasionalisme tergantung dari sudut pandang masing-masing. Ernest Renan menyebutkan, nasionalisme merupakan rasa kesadaran yang kuat berlandaskan atas kesadaran akan pengorbanan yang pernah diderita bersama dalam sejarah dan atas kemauan menderita untuk masa mendatang.

Snyder, menyebutnya nasionalisme sebagai faktor psikologik, ialah keadaan pikiran, perasaan atau sentiment dari suatu kelompok manusia yang hidup di daerah tertentu, mempunyai kesamaan dalam beberapa aspek (bahasa, adat, agama). Dalam hal itu perbuatannya dilakukan atas dasar kesadaran (panggilan hati nurani). Secara politik, nasionalisme merupakan kebangunan bangsa-bangsa terjajah sebagai reaksi terhadap kehadiran kolonialisme.

Kolonialiosme kita pandang sebagai rangkaian daya upaya suatu bangsa untuk menaklukkan bangsa lain dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, kolonialisme adalah dominasi politik, eksploitasi ekonomi dan penetrasi kebudayaan. Dalam hubungan ini Ruslan Abdulgani menegaskan bahwa nasionalisme memiliki 3 aspek, yakni aspek politik bersifat menumbangkan

dominasi politik; aspek sosial ekonomis bersifat menghentikan eksploitasi ekonomi; dan aspek kultural bersifat menghidupkan kembali kepribadiannya.[8]

Dari segi bahasa, nasionalisme berkaitan erat dengan istilah "***nation***" dan "***nationality***". *Nation* (bangsa) mempunyai dua arti.

1. Secara antropologi bangsa merupakan *cultural unity*. Ialah suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri, yang masing-masing anggotanya merasa satu kesataun (dalam ras, bahasa, religi, sejarah, adat-istiadat). Satu persekutuan hidup tersebut adalah sekelompok manusia dengan persamaaan kultur (kebudayaan), dalam mana anggotanya tergabung dalam *cultural unity*.
2. Bangsa dalam arti politik (kenegaraan), adalah suatu *political unity*, dalam mana masing-masing anggota (warga negara) berdiam dalam satu wilayah yang disebut negara, merupakan satu pemerintahan yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi.

Nationality, menunjuk pada satu kesatuan kedirian yang khas bagi suatu bangsa (dalam arti politik) yang dimanifestasikan dalam bidang ipoleksosbud dan psikologi.

Dari segi ideologis, nasionalisme adalah suatu paham, bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Dalam konteks ini, nasionalisme merupakan paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Dalam hal ini

[8]Roeslan Abdulgani. *Sosialisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Prapantja. 2004.

terkandung kesetiaan untuk menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara, maka yang terpenting adalah kemauan bersama yang hidup nyata. Kemauan itulah yang mengilhami sebagian terbesar warga negara (penduduk) dan mewajibkan dirinya (tiap individu) untuk mengilhami anggota-anggotanya.

Lebih tegas Stoddard, (1) nasionalisme adalah *a state of mind*, ialah suatu keadaan jiwa, suatu kepercayaan dianut oleh sejumlah besar individu (warganegara) hingga mereka membentuk suatu kebangsaan. (2) nasionalisme adalah *a sense of belonging together*, ialah rasa kebersamaan segolongan sebagai suatu bangsa. Secara umum nasionalisme itu adalah suatu paham kebangsaan, paham pendirian dan sekaligus keyakinan suatu bangsa, dalam mana mereka merasa dalam satu ikatan kesatuan dan persatuan sebagai suatu bangsa baik ke dalam maupun ke luar.[9]

1. Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme Indonesia adalah bagian dari nasionalisme Timur, ialah kebangunan bangsa-bangsa Timur (Asia) menentang segala bentuk dominasi, eksplopitasi dan penetrasi (masuknya) bangsa Barat (Eropa). Nasionalisme Asia sendiri merupakan suatu gerakan yang menentang aksinya kolonialisme Barat yang menyebabkan bangsa Asia kehilangan kemerdekaan politik, kebebasan perekonomian dan lapangan kebudayaan. Sehingga secara sosial ekonomi menimbulkan kemelaratan, kesengsaraan dan terbongkarnya akar kebudayaan bangsa Asia.

---

[9]Abby Stoddard. *Ethnonationalism and the Failed State: Source of Civil State Fragmentation in the International Political Economy*. 2000.

Dengan demikian nasionalisme Asia itu mempunyai 3 aspek, yakni:

a. Aspek politik, sifatnya menumbangkan dominasi politik bangsa asing yang menjajah (dalam hal ini bangsa Barat atau yang sering disebut Eropa)
b. Aspek sosial ekonomi, sifatnya menghentikan eksploitasi ekonomi asing dan membangunkan status masyarakat bebas dari kemelaratan dan kesengsaraan. Orientasinya utk mewujudkan kesejahteraan)
c. Aspek kultural, sifatnya menghidupkan kembali kepribadiannya disesuaikan dengan perubahan zaman.(dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka).

Sejalan dengan tumbuhnya nasionalisme Asia (meskipun tidak sama di setiap negara), nasionalisme Indonesia pada dasarnya juga merupakan reaksi terhadap kolonialisme-imperialisme Barat, ialah Belanda untuk menciptakan suatu negara nasional. Nasionalisme Indonesia juga mempunyai basis historis kolonialisme (seperti negara-negara Asia tenggara), maka sifatnya anti kolonialisme. Oleh karena itu pada masa kolonial, nasionalisme dipandang sebagai kekuatan sosial yang mempunyai orientasi terhadap masa depan, ialah menciptakan negara nasional. Tetapi dari sisi ideologi kolonial, nasionalisme dipandang sebagai kekuatan antagonistis (bertentangan), maka dianggap ekstrimis, penjahat, sehingga perlu dilawan.

Nasionalisme Indonesia mengandung beberapa aspek, yaitu :

a. Aspek ekonomi

   Sebagaimana diketahui, bahwa nasionalisme itu adalah reaksi dari kolonialisme, karena adanya eksploitasi yang menimbuilkan

pertentangan kepentingan secara tyerus menerus. Penjajah melakukan tindakan eksploitasi ekonomi untuk melindungi kepentingan ekonominya.

Kepentingan kaum kapitalis (penjajah) lebih mendapat prioritas dari pada kepentingan rakyat jajahan. Akibatnya kondisi hidup rakyat terbelakang (melarat, bodoh, menjadi penduduk nomordua)

Kondisi sosial ekonomi rakyat jajahan tersebut, menjadi daya dorong timbulnya solidaritas, yang kemudian diwujudkan dengan bentuk reaksi yang diucapkan dan agitasi (hasutan) terhadap orang asing.

b. Aspek sosial (munculnya kekuatan sosial)

Solidaritas yang dibangun oleh rakyat jajahan, membawa terbentukya oraganisasi-organisasi dengan sifat dan struktur fungsional tersendiri yang kemudian berkembang menjadi wahana pergerakan nasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi tersebut menjadi jalan untuk membangun suatu kekuatan sosial.

c. Aspek kebudayaan

Nasionalisme Indonesia pada tingkat awal juga dikenal sebagai kedaerahan, kesukuan, seperti : Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, rukun Minahasa, Pasundan.

Budi Utomo sebagai organisasi induk pergerakan nasional, semula juga bersifat kedaerahan, ialah Jawa. Maka organisasi ini membatasi kegiatannya dan tidak ingin mencampuri golongan lain. Namun dalam kenyataannya, Budi Utomo juga membuka kerjasama dengan golongan

bangsa Indonesia lainnya, tujuannya adalah membentuk persatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran inilah yang kemudian dipandang sebagai bibit nasionalisme.

d. Aspek politik

Sudah bisa diduga, bahwa sistem kolonial itu berlawanan dengan unsur demokrasi, dan pemerintahan kolonial lebih memberi prioritas pada kepentingan modal kolonial dari pada kepentingan rakyat jajahan.

Pergerakan sosial dianggap sebagai tindak kejahatan dan membahayakan ketertiban sosial dalam lingkungan kehidupan kolonial.

Di tanah jajahan, dominasi politik kolonial akan melindungi monopoli ekonomi kilonial. Penjajah menggunakan pemerintahan kolonial sebagai alat kekuasaan, setiap aspirasi nasional (rakyat jaajahan) selalu dicegah. Nasionalisme Indonesia mestinya harus dipahami sebagai hak bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, dan karena itu anti imperialisme, jadi konsisten dengan prinsip demokrasi. Nasionalisme akan berfungsi sebagai kekuatan yang menyatukan suku-suku, kelompok-kelompok etnis yang terpisah yang mendiami wilayah Nusantara.

2. Paham Nasionalisme Indonesia

Masyarakat bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam suku agama, politik dan aliran, tetapi mempunyai persamaan asal usul leluhur, nasib dan derita di masa lalu, perjuangan untuk membebaskan diri

dari penjajah, persamaan cita-cita membentuk negara merdeka. sungguhpun demikian bangsa Indonesia nyata-nyata merupakan satu jiwa, yakni jiwa Indonesia ber-Pancasila, satu solideritas besar, yakni nasionalisme Indonesia. Semua itu tercermin dalam sesanti " Bhineka Tunggal Ika" (berbeda-beda namun satu juga, ialah Indonesia.

Nasionalisme Indonesia sebagai bentuk solideritas nasional telah dinyatakan sejak Sumpah Pemuda 1928, kemudian dimantapkan menjelang proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan sebagai prinsip sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia yang dimaksud ialah "usaha ke arah bersatu dalam kebulatan satu kesatuan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negeri Indonesia". Konsep persatuan ini mengandung makna dinamis, artinya penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus berkembang.

Paham nasionalisme Indonesia tidak bersifat sempit yang menjurus pada rasialis, jingoisme (mengagungkan kekuasaan dan kebesaran negeri sendiri), chauvinisme (patriotik yang berlebihan). Tetapi juga tidak bersifat luas dan tak terbatas. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme Pancasila, nasionalisme yang menerima bangsa lain menjadi rakyat Indonesia sebagai kesatuan, dan menghargai bangsa lain sebagai sesama makluk Tuhan serta menghargai karya bangsa lain.

Untuk mewujudkan hidup bersama sebagai satu kesatuan bangsa besar, yakni bangsa Indonesia, maka nasionalisme Indonesia harus dibina

dan ditegakkan dipadu dengan semangat patriotisme, jiwa dan semangat cinta tanah air. Segenap warga Indonesia wajib bersatu dan mencintai sungguh-sungguh, rela berkorban membela tanah air Indonesia.

3. Lahirnya Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme sebagai konsep kebangsaan berupa cinta tanah air dan bangsa, telah dikenal bangsa Indonesia sejak lama, yakni yang pada awalnya dalam bentuk sederhana dan mempunyai lingkup sempit (kedaerahan, kesukuan). Konsep itu berupa perlawanan anti kolonialisme-imperialisme atau bentuk penolakan lainnya.

Konsep cinta tanah air dan bangsa ini, baru kemudian tumbuh dan dikembangkan oleh kaum terpelajar Indonesia hasil pendidikan Barat awal abad 20, ialah diterapkannya politik etis oleh pemerintah kolonial untuk penduduk jajahan.[10]

Meskipun politik etis itu pelaksanaannya masih berpijak pada sistem stratifikasi, sehingga tidak semua penduduk jajahan dapat mengikutinya. Akan tetapi satu akibat yang tidak sengaja dari politik etis itu, ialah lahirnya masyarakat terpelajar pada sebagian penduduk jajahan. Ini merupakan akibat yang cukup jauh yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah kolonial dari tujuan politik etis itu sendiri, ialah terpenuhinya tenaga terdidik murah dari penduduk jajahan.

Dari para terpelajar itu, bibit nasionalisme bersemi yang kemudian mendorong lahirnya gerakan nasional dan berkembang menjadi

---

[10]Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah.* Jakarta: Paramadina, 2008.

perkumpulan kepemudaan, seperti: Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon dan sebagainya. Konsep nasionalisme agar dapat memberi manfaat dan hasil yang konkrit bagi rakyat Indonesia, maka perlu instrument (perangkat) yang dapat mendukung perjuangan ide-ide nasionalisme.

Alat *(instrument)* itu adalah arganisasi yang teratur dan modern, kesadaran akan perlunya organisasi menjadi motivasi kuat untuk mewujudskan ide nasionalisme. Sehingga kemudian lahirnya organisasi Budi Utomo. Meskipun Budi Utomo itu awal kelahiranya masih bersifat kedaerahan, baik sifatnya maupun lingkup geraknya, ialah Jawa, tetapi menjadi perintis, pelopor lahirnya organisasi-organisasi berikutnya sebagai wadah pergerakan nasional Indonesia., seperti SDI (SI), Indishe Partaj, PNI dan seterusnya). Melalui organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia, nasionalisme Indonesia terus berkembang dan maju ke arah yang pasti, dan makin lama menunjukkan kematangan dan kerevolosionerannya.

Organisasi-organisasi tersebut, selain keanggotaannya semakin luas, jangkauan geraknya juga tidak terbatas Jawa maupun golongan tertentu, (lebih luas), juga menjadi organisasi yang mempunyai corak tegas dan radikal. Dalam perkembangannya, konsep kebangsaan (nasionalisme) terus mencapai kedewasaan dan aktivitas geraknya menjadi lebih tegas dan radikal, ialah Indonesia merdeka lepas dari ikatan penjajah. Perlu disadari bahwa nasionalisme pada zaman penjajahan (kolonial) itu, baru mencapai taraf :

a. Ingin memiliki negara, ialah Indonesia merdeka.

   Pada taraf ini gerakan nasionalisme berbentuk perjuangan melepaskan bangsa dari ikatan penjajah dan mewujudkan negara yang luasnya sama dengan wilayah pendudukan Belanda, yang dikenal Hindia Belanda. Perjuangannya dihadapkan kepada penjajah, ialah Belanda, dengan tujuan merdeka. Dengan merdeka, akan dapat mengatur (mengurus) rumah tangganya sendiri menurut konsepnya sendiri. Merdeka merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengatur dirinya sendiri sebagai bangsa.

b. Berwatak anti penjajah (Belanda).

   Terhadap bangsa Indonesia, Belanda memiliki komplek superior, memandang penduduk jajahan lebih rendah dalam segala bidang. Kepentingan penduduk jajahan yang ingin melepaskan diri dari penjajah adalah antitesis (berlawanan) dengan kepentingan penjajajh. Maka dari itu setiap usaha memperjuangkan ide, tujuan nasionalisme, selalu berbenturan (bentrok) dengan pihak yang berkuasa, ialah penjajah.

Dengan makin meluasnya semangat Indonesia merdeka, nama Indonesia menjadi populer dan menjadi ikatan nasional. Melalui berbagaai rangkaian kegiatan pergerakan nasional Indonesia, kemudian dikukuhkan dalam satu peristiwa yang menentukan bagi sejarah bangsa, ialah Sumpah Pemuda 1928, yang kemudian semangat Sumpah Pemuda ini dikobarkan lagi oleh Bung Karno dalam pidatonya mengenai Indonesia Menggugat tahun 1930.

Dalam perkembangan selanjutnya, sebuah bangsa baru benar-benar lahir ke dunia melalui kemerdekaan dari penjajah. Bangsa ini (Indonesia) sebuah bangsa yang tidak mendasarkan eksistensinya kepada rasialisme, etnisisme, sektarianisme, tetapi mendasarkan pada cita-cita menciptakan kemaslahatan umum dan kesejahteraan bagi semua.

4. Multikulturalisme

Multikulturalisme dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini, merupakan isu penting yang mengiringi gelombang demokratisasi. Multikulturalisme, pada dasarnya merupakan kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa membedakan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa ataupun agama. Multikulturalisme memberi penegasan seseorang atau kelompok, bahwa dengan segala perbedaannya diakui dan sama di dalam ruang publik. Konsep ini menjadi semacam respon terhadap keragaman. Artinya adanya komunitas yang berbeda saja tidak cukup, sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas tersebut diperlakukan sama oleh warga negara maupun negara.

Pada awal kemunculan istilah ini, adalah untuk menggambarkan masyarakat perkotaan yang multikultural dan multilingual. Dalam perkembangannya menjadi suatu strategi integrasi dalam masyarakat majemuk dan komplek melalui pendidikan multikultural.

Istilah yang mirip dengan terminologi multikulturalisme, ialah masyarakat majemuk *(plural society)*, tetapi berbeda dalam konsep dan

pemaknaan. Masyarakat majemuk lebih menekankan soal etnisitas atau suku, dengan penekanan itu, pada gilirannya membangkitkan gerakan etnosentrisme, etnonasionalisme, sifatnya primordial, askriptif. Karena itu pada masyarakat majemuk chauvisme sangat potensial tumbuh (rentan konflik).

Dalam mana karakter masyarakat majemuk sangat mengagungkan ciri kesukuan, kelompokisme, maka anggota dari kelompok ini memandang kelompok lain dengan cara pandang mereka yang rasial, sukuisme. Karena itulah konflik antara mereka dapat terjadi setiap saat. Multikulturalisme sangat menjunjung perbedaan dan menjaga agar perbedaan itu tetap hidup dan berkembang secara dinamis. Multikulturalisme memandang manusia sebagai sesuatu yang universal, sama. Perbedaan merupakan kesempatan untuk mewujudkan hakikat sosial manusia dengan dialog dan komunikasi, sehingga terbangun suatu kebersamaan, toleran, hidup berdampingan secara damai.

Hal yang perlu dicatat, bahwa setiap entitas masih membawa jati dirinya, tidak terlebur kemudian hilang. Meskipun mereka hidup berdampingan dalam ranah sosial, tetapi antara mereka (entitas) tetap ada jarak (aku dan engkau kita berdua tetap ada jarak). Oleh karena itu untuk menjaga kebersamaan, diperlukan jalinan komunikasi, dialog dan toleransi.

Karakter masyarakat multikulturalisme adalah toleran, ialah semangat hidup berdampingan secara damai. Dalam kondisi hidup

berdampingan itu, baik individu maupun kelompok dari etnik dan budaya, tidak kehilangan identitas etnik dan budayanya. Hal ini ditandai oleh adanya jarak antara entitas (aku dan engkau).

Seide dengan konsep masyarakat multikulturalisme ialah masyarakat madani. Dalam masyarakat madani merupakan sistem sosial yang berkembang (hidup) berdasarkan prinsip moral (etikat baik) yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat.

Ciri masyarakat madani adalah kemajemukan budaya, hubungan timbal balik, sikap saling memahami dan saling menghargai. Dengan ciri itu masyarakat madani lebih mendasarkan prinsip moral, keadilan, kesamaan, musyawarah dan demokrasi. Hal yang penting juga dalam masyarakat madani, bahwa warga masyarakat bekerja membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat nonnegara.

Dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integritas sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup: menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan, dan hidup dalam suatu persaudaraan.

5. Kaitannya dengan Nasionalisme

Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (nation) dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia (warga

masyarakat). Ikatan ini terjadi dan tumbuh di tengah masyarakat saat manusia (warga masyarakat) mulai memikirkan hidup bersama dalam satu wilayah tertentu, ialah negara yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan bangsa lain.

Perlu dipahami bahwa semula yang namanya Indonesia itu, terdapat berbagai suku bangsa yang mendiami kawasan dalam lingkungan pulau-pulau. Masing-masing pulau terisolasi satu dari yang lain karena factor alamiah, sehingga mengakibatkan hubungan antar pulau menjadi tidak mudah. Kondisi ini mendorong tumbuhnya ciri kesukuan, kebahasaan, kebudayaan yang terpisah-pisah yang masing-masing berbeda, sehingga memunculkan sifat khas masing-masing menurut lingkungannya.

Dalam kondisi yang berbeda-beda itu, nasionalisme tumbuh ditandai adanya perasaan kebangsaan dan kesamaan nasib yang diikuti dengan perlawanan terhadap penjajah maupun bentuk penolakan lainnya. Dalam arti timbulnya reaksi masyarakat bangsa Indonesia terhadap sikap dan tindakan penjajah. Dalam hal inilah penjajah mulai merasakan adanya penolakan dari rakyat terjajah, yang ditandai terjadinya pemberontakan-pemberontakan di beberapa daerah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional. Pemberontakan-pemberontakan itu secara politis untuk melepaskan diri dari penjajah, mengusir penjajah dari bumi Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan bidang kajiannya, penelitian hukum ini merupakan Penelitian Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji aturan-aturan hukum dan bahan-bahan hukum pendukung lainnya yang terkait Sistem Kenegaraan Pancasila Sebagai Integritas NKRI. Penelitian Normatif juga sering disebut sebagai penelitian Doctrinal, yaitu penelitian dengan obyek kajiannya adalah dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka.

B. Jenis Bahan Hukum

Suatu penelitian hukum normatig dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja (yaitu pada data sekunder). Data sekunder diperoleh dengan mengkaji dan menganalisa kepustakaan atau dokumen. Data sekunder yaitu data yang berdasarkan teknik penelusuran bahan dan dokumen hukum, terbagi atas :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah atau bahan hukum primer adalah bahan yang harus ada dalam penelitian yang mempunyai kekuatan mengikat dan dalam keadaan siap terbukti, seperti Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer atau dengan kata lain

bahan hukum hukum sekunder dapat berupa bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan Pancasila
b. Makalah-makalah, artikel-artikel dan karya tulis.

C. Tehnik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisa bahan hukum atau menarik kesimpulan dari hasil penelitian maka terhadap bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan metode analisa isi atau content analysis. Analisa isi *(content analysis)* adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru *(replicable)*, dan sahih bahan hukum dengan memperhatikan konteksnya. Artinya untuk meperoleh kesimpulan atas rumusan permasalahan, dilakukan analisa terhadap data – data bahan hukum baik bahan hukum primer dan sekunder.

DAFTAR PUSTAKA

Abby Stoddard. 2000. *Ethnonationalism and the Failed State: Source of Civil State Fragmentation in the International Political Economy*.

Abdulgani, Roeslan. 2004. *Sosialisme Indonesia*. Jakarta: Yayasan Prapantja.

Kartohadiprodjo, Soediman. 1983. *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, cetakan ke-4, Bandung, Penerbit Alumni.

Madjid, Nurcholish. 2008. *Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah.* Jakarta: Paramadina, 2008.

Mohammad Noor Syam 2007: *Penjabaran Fislafat Pancasila dalam Filsafat Hukum* (*sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional*), *disertasi* edisi III, Malang, Laboratorium Pancasila.

_____. 2000. *Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia (Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional),* edisi II, Malang Laboratorium Pancasila.

_____. 2010. *Membudayakan Pilar-Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.* Makalah Sarasehan Nasional. Malang.

Murphy, Jeffrie G & Jules L. Coleman 1990: *Philosophy of Law An Introduction to Jurisprudence*, San Francisco, Westview Press.

Nawiasky, Hans 1948: *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Zurich/Koln Verlagsanstalt Benziger & Co. AC.

Notonagoro, 1984: *Pancasila Dasar Filsafat Negara*, Jakarta, PT Bina Aksara, cetakan ke-6.

_____. 2002. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila.* Jakarta : Rajawali.

Radhakrishnan, Sarpavalli, et. al 1953: *History of Philosophy Eastern and Western*, London, George Allen and Unwind Ltd.

Rasjidi, Lili. 2008. *Pengantar Filsafat Hukum; Apakah Hukum itu?*. Bandung: Remadja Karya.

UUD 1945, UUD 1945 Amandemen, Tap MPRS – MPR RI dan UU yang berlaku. (1966; 2001, 2003) dan PP RI No. 6 tahun 2005.

Wibisono, Koento. 1997. *Filsafat Ilmu sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Klaten : Intan Pariwara.